

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Analisis Literatur tentang Peran Pajak UMKM dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

Izza Nur Lathifa Siregar^a, Abdul Rahman^b

^{a,b}Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a izzanur693@gmail.com, ^b rhnoke@gmail.com

Abstrak

Kajian ini mengulas literatur mengenai peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Studi ini mengkaji, melalui tinjauan sistematis literatur akademis, bagaimana kebijakan pajak untuk usaha kecil berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Temuan utama menunjukkan bahwa pajak terhadap usaha kecil dan menengah dapat berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan dalam meningkatkan hasil pembangunan pemerintah. Mengembangkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Namun, ada juga tantangan seperti kurangnya undang-undang perpajakan. Kurangnya pengetahuan tentang tujuan keberlanjutan dan hambatan birokrasi. Studi ini menyoroti pentingnya menyelaraskan kebijakan perpajakan UKM dengan tujuan keberlanjutan dan merekomendasikan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sektor ini dalam pembangunan berkelanjutan. Studi ini juga mengatasi kesenjangan dalam literatur yang ada, dan menyarankan arah untuk penelitian masa depan. Hal ini mencakup penelitian empiris mengenai dampak kebijakan pajak UKM terhadap indikator SDG tertentu. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil kebijakan guna mengembangkan sistem perpajakan yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi UKM Indonesia. Memperkuat peran usaha kecil dan menengah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030.

Kata Kunci: Sustainable Development Goals (SDGs); Pajak; UMKM.

Literature Analysis on the Role of MSME Taxes in Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia

Abstract

This study reviews the literature on the role of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. The study examines, through a systematic review of academic literature, how tax policies for small businesses contribute to the achievement of the SDGs. Key findings suggest that taxation of small and medium enterprises can contribute to the sustainability goals of improving government development outcomes. Developing sustainable business practices. However, there are also challenges such as the lack of tax laws. Lack of knowledge about sustainability goals and bureaucratic barriers. The study highlights the importance of aligning MSME tax policies with sustainability goals and recommends policy measures to enhance the sector's participation in sustainable development. The study also addresses gaps in the existing literature, and suggests directions for future research. This includes empirical research on the impact of MSME tax policies on selected SDG indicators. The results of this study can provide useful information for policy makers to develop a more efficient and sustainable tax system for Indonesian MSMEs. Strengthening the role of small and medium enterprises in achieving the 2030 sustainable development goals.

Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs); Tax; MSMEs.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 (Fahri, 2024). Agenda tersebut terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang ingin dicapai pada tahun 2030, dan Indonesia menjadi salah satu diantaranya. penandatanganan komitmen ini harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan SDGs untuk pembangunan nasional. Namun dalam pelaksanaannya pada konteks lokal hal ini seringkali memunculkan permasalahan (Afandi et al., 2021; Pradesa dan Agustina, 2020) tidak hanya pada sektor privat maupun lainnya (Agustina dan Pradesa, 2024; Taufik et al., 2022). Dalam mencapai SDGs di Indonesia salah satu hal yang tidak dapat dikecualikan adalah peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian dan lapangan kerja negara (Kumalasari et al., 2022). Sementara UMKM dengan berbagai dinamika yang dihadapinya tetap dituntut untuk berkreasi dan berupaya secara strategis (Indarsyah et al., 2023; Tindaon dan Asty, 2023; Tindaon, 2023; Rahman et al., 2020; Nugroho et al., 2020) dalam mencapai daya saing yang berkelanjutan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian. Namun diketahui terdapat kesulitan meningkatkan kepatuhan pajak pada sektor UMKM (Tindaon dan Rahman, 2018), sehingga hal ini dapat menyulitkan terlaksananya tujuan SDG .

Di Indonesia Usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Negara ini menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut dan mempekerjakan sekitar 97% angkatan kerja negara tersebut. Sebagai penggerak utama perekonomian, UMKM memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di

berbagai bidang seperti penciptaan lapangan kerja dan kemiskinan terutama di daerah sub-urban seperti desa (Wijayanti dan Taufik, 2022; Taufik et al., 2022). Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan. Pajak-pajak ini dapat meningkatkan pendapatan pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan. Namun pajak bagi UMKM mempunyai kelebihan dan kekurangan terutama dampak terhadap kelangsungan hidup dan daya saing perusahaan kecil dan menengah. Namun tingkat kepatuhan pajak di kalangan UKM masih rendah, hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan perpajakan. Rendahnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak atau persepsi bahwa beban pajak terlalu tinggi dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis peran pajak UMKM dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Penelitian sebelumnya berfokus pada isu-isu yang lebih spesifik, Tinjauan literatur yang disajikan memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UKM, seperti penerapan pajak karbon (Fandira et al., 2022; Meila et al., 2024) integrasi zakat dan pajak (Nikmah, 2022), serta insentif ekonomi dalam perpajakan wabah COVID-19 (Kumalasari et al., 2022) yang mempertimbangkan perubahan pola konsumsi di masyarakat (Nugroho et al., 2021; Ravenska dan Zulvia, 2022). Namun, masih ada beberapa kesenjangan yang belum terisi dalam penelitian sebelumnya Peran spesifik pajak UMKM dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

Tantangan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif bagi UKM untuk mendukung

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

SDGs belum sepenuhnya tereksplorasi (Marlinah, 2020). Degradasi lingkungan Kurangnya koordinasi antar berbagai sektor dan perubahan iklim dapat menghambat upaya pencapaian SDGs melalui kebijakan perpajakan untuk UKM. Belum ada penelitian yang memberikan rekomendasi atau strategi kebijakan komprehensif kepada pemerintah mengenai optimalisasi peran pajak UKM dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia (Sitorus & Sinaga, 2024).

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Saputra & Meivira, 2020) menunjukkan bahwa pajak dan pendidikan penting bagi usaha kecil. Kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan seringkali menghalangi usaha kecil untuk memanfaatkan manfaat pajak. Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam memberikan pengetahuan perpajakan kepada UKM di Indonesia. Di sisi lain, (Nisaak & Khasanah, 2022) menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak stabil dan terus berubah dapat mengancam stabilitas UKM. Oleh karena itu, konsistensi kebijakan perpajakan merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dari UMKM.

Mengingat kesenjangan penelitian ini, diperlukan penelitian untuk menganalisis secara mendalam peran pajak UMKM dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. Analisis ini mengkaji isu-isu seperti pajak UMKM, dampak pajak terhadap aktivitas UMKM dan potensi pajak UMKM untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran perpajakan UMKM dalam mendukung pencapaian melalui kebijakan perpajakan yang efektif bagi UKM. Khususnya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan termasuk memperkuat tata kelola yang baik.

B. PEMBAHASAN

Pajak merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan. Untuk usaha kecil Aspek perpajakan Berbeda dengan usaha

besar, pajak pada UKM seringkali dirancang untuk memberikan insentif dan peluang bagi sektor tersebut untuk tumbuh dengan cepat. sesuai dengan peraturan nomor Sesuai dengan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 23 September 2018 Tarif pajak bagi usaha kecil dan menengah adalah sebesar 0,5% dari penghasilan untuk kepentingan usaha kecil dan menengah (Siallagan et al., 2020).

UMKM berperan penting dalam mencapai beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, seperti Pengentasan kemiskinan (SDG 1). Usaha kecil dan menengah dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja (Chopra et al., 2022). Dengan kesederhanaan sistem perpajakan, perusahaan kecil dan menengah dapat beroperasi lebih efisien dan memperluas cakupan operasinya.

Pendidikan berkualitas (SDG 4) Banyak UMKM yang mampu menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi karena pendapatan yang mereka hasilkan (Chopra et al., 2022). Kebijakan keuangan yang ramah UMKM memperkuat daya beli keluarga UMKM dan memungkinkan mereka berinvestasi di bidang pendidikan. Usaha kecil dan menengah mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia. Pembebasan pajak mendorong pendirian dan pengembangan perusahaan

Industri, Inovasi dan Infrastruktur (SDG 9) Insentif pajak mendorong UKM untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Hal ini mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif. Mengurangi ketimpangan (SDG 10): Pengembangan usaha kecil, menengah, dan menengah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi regional (Setiawan, 2023). Berikut yang termasuk Peran Pajak UMKM dalam Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia :

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

1. Perusahaan mikro, kecil dan menengah merupakan basis ekonomi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perpajakan terhadap UMKM adalah sumber pembiayaan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kehadiran usaha kecil dan menengah dalam perekonomian negara memainkan peran mendasar dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia (Aliyah, 2022). Pajak UMKM dapat dipahami sebagai sumber utama pembiayaan proyek-proyek pemerintah (Siallagan et al., 2020).

UMKM berada di garis depan dalam mencapai pilar ekonomi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja mempromosikan kreativitas dan inovasi bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengingat besarnya jumlah usaha kecil dan menengah di Indonesia, maka potensi penerimaan pajak dari sektor ini sangat besar. Akses terhadap pendanaan yang memadai dan berkelanjutan merupakan hal mendasar untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pendapatan tambahan ini dapat dialokasikan untuk proyek-proyek. Kegiatan ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 (tidak ada kemiskinan) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9 (inovasi dan infrastruktur bisnis) (Sitorus & Sinaga, 2024).

2. Tanggung jawab keuangan dan kelangsungan keuangan perusahaan kecil dan menengah

Penelitian ini memberikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak oleh UKM (Shafira Kumalasari et al., 2022). Kepatuhan perpajakan yang lebih baik menjamin penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup dukungan keuangan jangka panjang untuk proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Upaya bersama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terkait pajak UKM di Indonesia Semua aspek sistem

perpajakan UKM (pendaftaran, pelaporan, pembayaran), mendukung tujuan Pembangunan Berkelanjutan tertentu seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan keberlanjutan lapangan dan membantu – atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (SDG 12). Kepatuhan diharapkan meningkat ketika UKM menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Insentif pajak bagi perusahaan kecil dan menengah merupakan salah satu alat kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

Studi ini membahas peran insentif pajak bagi usaha kecil. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Meskipun pemberian manfaat pajak jangka pendek dapat mengurangi pendapatan pemerintah, kebijakan ini dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menjamin kelangsungan usaha kecil dan menengah. Ketahanan sektor UMKM sangat penting untuk mencapai banyak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya, mengurangi kemiskinan (SDG 1), menciptakan lapangan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dan kesenjangan (SDG 10).

Pendapat ini didukung oleh (Chopra et al., 2022), pemulihan ekonomi pascapandemi yang dapat dicapai dengan kebijakan fiskal yang tepat. Usaha kecil adalah tulang punggung perekonomian negara. Ini memainkan peran penting dalam proses pemulihan ini. Oleh karena itu, penting untuk merancang sistem perpajakan bagi UKM yang mendukung pemulihan bisnis sekaligus mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4. Pendidikan keuangan dan tujuan pembangunan berkelanjutan

Peran informasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha kecil. Kesadaran yang lebih besar ini dapat mendorong pembayaran pajak sukarela oleh UKM, yang penting bagi keberlanjutan sistem perpajakan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Saputra &

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Meivira, 2020). Maka, pendidikan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembayaran pajak UMKM.

5. Strategi pembangunan berkelanjutan

(Hari Kristianto, 2020) menyoroti pentingnya strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia. Inovasi berfokus pada bagaimana strategi pajak untuk UMKM dapat diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, bagaimana struktur pajak untuk UMKM dapat mendorong praktik bisnis ramah lingkungan atau mendukung inklusi sosial. Tinjauan ini menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan inklusif dan seimbang tanpa merusak lingkungan.

Dalam konteks ini, pajak terhadap UKM dapat dipahami tidak hanya sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Namun hal ini juga merupakan cara untuk memandu perilaku UMKM menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Misalnya, pajak membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), memberikan keringanan pajak kepada perusahaan kecil dan menengah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan atau mempekerjakan penduduk, pekerja, komunitas ekonomi dan masyarakat kurang mampu (Sitorus & Sinaga, 2024).

6. Kerjasama dengan berbagai Pihak

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Firmansyah, 2024). Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terkait pajak UMKM, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, dapat memimpin inisiatif dengan menyusun kebijakan pajak yang mendukung pertumbuhan UMKM sekaligus memastikan penerimaan negara yang optimal. Kementerian Koperasi dan UKM dapat berkolaborasi dalam merancang program edukasi dan pendampingan terkait kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM.

Sektor swasta, terutama perusahaan teknologi finansial, dapat berkontribusi dengan mengembangkan platform digital yang memudahkan UMKM dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Lembaga pendidikan tinggi dapat melakukan riset untuk mengoptimalkan sistem perpajakan UMKM, sementara asosiasi pengusaha UMKM dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Media massa dan platform digital berperan penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM. Dengan kolaborasi sinergis ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem perpajakan UMKM yang adil, efisien, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan visi Society 5.0 yang mengedepankan integrasi teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.

7. Transparansi dan tanggung jawab

Sebagaimana dikemukakan dalam artikel ini, tata kelola yang baik memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik (Sari, 2019). Pemerintah perlu menunjukkan kepada UKM bahwa pendapatan pajak dikelola dengan baik dan digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sistem perpajakan yang transparan bagi UMKM yang secara jelas mengatur penggunaan pajak akan membantu meningkatkan kepercayaan pemilik UMKM terhadap sektor publik. Hal ini juga dapat meningkatkan regulasi fiskal sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendukung SDG 16 (perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat).

Dengan pengelolaan yang benar, pajak usaha kecil dapat menjadi sumber pendanaan program pemberdayaan masyarakat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 (pencegahan kemiskinan) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 10 dapat dicapai jika sebagian pendapatan pajak dari usaha kecil dan menengah dialokasikan untuk pelatihan wirausaha. Akses terhadap kebijakan keuangan mikro Mengembangkan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

infrastruktur di daerah tertinggal untuk mengurangi ketimpangan.

8. Pemantauan dan evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat diperlukan untuk mengukur kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sari, 2019). Dalam kasus pajak UKM, hal ini dapat berarti mengembangkan indikator spesifik yang tidak hanya mengukur nilai penerimaan pajak, namun juga dampak sosial dan lingkungan dari penggunaan dana tersebut. Tinjauan rutin membantu menyelaraskan praktik perpajakan UKM dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara lebih efektif.

9. Keadilan dan kesetaraan

Ide penggabungan zakat dan jenis pajak lainnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan (Nugroho et al., 2022). Sedangkan untuk memungut pajak dari UMKM dapat dilakukan dengan sistem perpajakan yang benar-benar adil, dimana UMKM membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Sistem yang adil ini mendorong kepatuhan keuangan. Hal ini berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan (SDG 10) dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8).

10. Kebijakan Dukungan

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah dukungan seperti penyederhanaan administrasi perpajakan dan dengan memberikan dukungan dan pelatihan kepada pengelola UKM. Kebijakan ini akan memudahkan UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan meningkatkan pemahaman tentang dampak pajak terhadap pencapaian SDGs (Hari Kristianto, 2020).

11. Tantangan keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sektor UMKM di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam konteks perpajakan dan pembangunan berkelanjutan.

Masalah utama meliputi birokrasi yang rumit (Khusnul & Adinda, Tamara, 2022), rendahnya pemahaman keuangan dan pajak (Saputra & Meivira, 2020), kurangnya monitoring penggunaan insentif pajak, tantangan digitalisasi dan persaingan global, serta Perlunya menjaga kearifan lokal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penyederhanaan sistem perpajakan, peningkatan edukasi keuangan dan pajak bagi UMKM, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap insentif pajak, merancang kebijakan pajak yang mendorong praktik bisnis berkelanjutan, mengalokasikan pendapatan pajak UMKM untuk program pembangunan berkelanjutan, memberikan keringanan pajak untuk UKM yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau mempekerjakan masyarakat kurang mampu, mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan dan adopsi teknologi digital serta memprioritaskan produk lokal dan menjaga kearifan budaya.

Pemerintah perlu merancang kebijakan pajak yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui insentif pajak untuk UMKM yang menerapkan teknologi ramah lingkungan atau mempekerjakan masyarakat kurang mampu. Penting juga untuk mengalokasikan pendapatan pajak UKM ke program pembangunan berkelanjutan dan melakukan monitoring berkala terhadap efektivitas kebijakan. Dengan pendekatan ini, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UKM dapat sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sambil tetap menjaga kearifan lokal dan daya saing produk dalam negeri.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Pajak usaha mikro, kecil dan menengah serta usaha kecil berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kebijakan perpajakan yang tepat tidak hanya mendorong pertumbuhan perusahaan kecil

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dan menengah. Namun hal ini juga berkontribusi terhadap pencapaian sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi inklusif memerlukan kebijakan keuangan yang sangat efektif dan efisien untuk menciptakan usaha kecil dan menengah yang kuat, berkelanjutan, dan dinamis. Hal ini berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Segala upaya harus dilakukan pemerintah, termasuk kesadaran perpajakan. Meningkatkan kepatuhan dan transparansi bagi perusahaan kecil dan menengah. Ketika merencanakan kebijakan perpajakan untuk usaha kecil dan menengah, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus diperhitungkan. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak pajak terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia dapat memastikan efisiensi implementasi kebijakan yang lebih berdampak besar bagi pembangunan di Indonesia.

REFERENSI

- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Agustina, I., Pradesa, H.A. (2024). Praktek Pelaporan Keberlanjutan Di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis Atas Literatur Terdahulu. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 7 (1), 24 - 46. <https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10947>
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64-72.
- <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Chopra, M., Singh, D. S. K., Gupta, A., Aggarwal, K., Gupta, B. B., & Colace, F. (2022). Analysis & prognosis of sustainable development goals using big data-based approach during COVID-19 pandemic. *Sustainable Technology and Entrepreneurship*, 1(2). <https://doi.org/10.1016/j.stae.2022.100012>
- Fahri, M. N. (2024). Strategi Media Sosial untuk Memperkuat Pemahaman dan Partisipasi Publik terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 139-148.
- Fandira, W., Solistiyowati, M., Riyan, M., & Widiyanto, B. (2022). Implementasi Pajak Karbon Sebagai Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak guna Menyongsong Sustainability Development Goals 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 2(1), 2022.
- Firmansyah, M. D. (2024). Transformasi Pendidikan Melalui Kolaborasi Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Untuk Literasi Digital Demi Pembangunan Berkelanjutan. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 317-327.
- Hari Kristianto, A. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27-38. <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v2i1.134>
- Indarsyah, R., Rahman, A. ., Putrianti, S. D. ., & Taufik, N. I. . (2023). Model Strategi Pemasaran Kue Kering Lebaran Di UMKM Ranayya Kitchen Menggunakan Business Model Canvas (BMC) Dan Analisis Swot. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 7471-7487.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.2790>
- Khusnul, A., & Adinda, Tamara, N. (2022). Potensi dan Tantangan Perpajakan Sebagai Kunci Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). In E. Damayanti (Ed.), *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* (1st ed., Vol. 135, Issue 4). Penerbit Widina.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.
- Meila, K. D., Dianty, A., & Veronica, L. (2024). Penerapan Pajak Karbon dalam Mewujudkan Sustainability Development Goals Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1849-1864. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2001>
- Nikmah, R. (2022). Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 92-111. <https://doi.org/10.22515/finalmaza.wa.v2i2.3569>
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422-433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Nugroho, R., Ad, Q., & Susilawati Muamarah, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Mental Accounting Dan Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(2), 1-27. <https://doi.org/10.35837/subs.v5i2.1378>
- Nugroho, A.B. , Ahmad, F., Harahap, A.S. (2020). Product Quality Improvement Strategy and Competitive Advantage In Industry Competition. *Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0*, 178 - 181.
- Nugroho, A. B., Ravenska, N., & Zulvia, P. (2021). Lifestyle Patterns During the Covid-19 Pandemic. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 564(Icas 2020), 78-82. <https://doi.org/10.2991/assehr.k210629.015>
- Pradesa, H.A., Agustina, I. (2020). Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 8 (2), 159 - 168.
- Rahman, A., Nugroho, A.B., Tindaon, S.S., Wijayanti, R. (2020). Advokasi Model Pemanfaatan E-commerce Untuk Peningkatan Daya Saing UMKM. *SeTIA MENGABDI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 63 - 69.
- Ravenska, N., & Zulvia, P. (2022). Perilaku Impulsive Buying Masyarakat Bandung Raya Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perbedaan Gender. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 15-26. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.133>
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak umkm. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059-1068.
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan (Governance Management Policy Integration For Sustainable Marine Development). *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 147-165.
- Setiawan, A. (2023). Upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia melalui optimalisasi manajemen celah pajak pada perusahaan energi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 2023.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Shafira Kumalasari, A., Junaid, A., Rahman, Z., Haeruddin, St. H., & Arsyad, Muh. (2022). Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar Di Masa Pandemi Covid 19. *Center of Economic Students Journal*, 5(1), 17-29. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i1.48>
- Siallagan, B., Ilat, V., & Runtu, T. (2020). Evaluasi Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 332. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28876.2020>
- Sitorus, R., & Sinaga, J. (2024). Regulations, Policies , and Governance in Achieve Sustainable Development Goals Regulasi , kebijakan , dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology(MARCOPOLO)*, 2(5), 893-906.
- Taufik, N., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Tindaon, S.S., Asty, W.D. (2023). Marketing Mix Strategy to Increase the Product Sales at Flaleeka Creative Industry. *Journal of Advanced Management Science* Vol. 11, No. 3, pp. 91 – 98.
- Tindaon, S.S. (2023).Edukasi dan Pelatihan Dasar Berinvestasi di Pasar Modal Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Agro Garut. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol Pp. 3330 – 3338.
- Tindaon, S.S., Rahman, A. (2018). The Analysis of Tax Compliance of Local Government Employees: Case Study of West Bandung Regency, Bandung Regency, and Majalengka Regency. *International Journal of Business and Administrative Studies*, volume 4 issue 6 pp. 232-238.
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEED)*, 5 (1), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>